SIARAN PERS
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

"BPK *AWARENESS*"
DINAS PENDIDIKAN dan TENAGA PENDIDIK di WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, Kamis (9 Oktober 2014) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan acara "**BPK *Awareness***" dengan mengundang Dinas Pendidikan dan Tenaga Pendidik SMA/SMK mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di Wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan tersebut dilaksanakan di aula kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah pukul 09.00 WIB-selesai.

Dalam sambutan dan paparannya Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, **Drs. Nur Hadi Amiyanto, M.Ed.** menyampaikan misi pembangunan Provinsi Jawa Tengah di bidang pendidikan adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Visi yang diusung Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah adalah pendidikan Jawa Tengah yang bermutu, kompetitif, berkarakter dan berkeadilan. Arah kebijakan yang disusun untuk mengatasi isu pokok pembangunan pendidikan yaitu (1) memastikan ketersediaan dan keterjangkauan, (2) meningkatkan mutu dan relevansi secara berkelanjutan, serta (3) memastikan sumberdaya dikelola efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Tengah, **Dr. Cris Kuntadi, C.A., C.P.A., Q.I.A.** menyampaikan kedudukan, fungsi dan tugas BPK. Berdasarkan SK BPK NOMOR 3/K/I-XIII.2/7/2014 tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan & tanggung jawab keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kota/kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN. SK tersebut mengubah pula struktur organisasi BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dari lima Subbagian menjadi enam Subbagian, yaitu Subbagian Keuangan, Subbagian SDM, Subbagian Umum dan TI, Subbagian TU, Subbagian Hukum dan Subbagian Humas.

Tugas pemeriksaan yang dilakukan BPK yaitu (1) pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah yang hasilnya berupa opini, (2) pemeriksaan kinerja yang menghasilkan temuan, simpulan dan rekomendasi, serta (3) pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang menghasilkan simpulan. BPK sebagai pemeriksa eksternal pemerintah merupakan badan yang independen, bertugas melakukan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Independensi BPK menjadikan hasil pemeriksaan lebih objektif.

Mengingat kedudukan BPK sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa ekstern pemerintah, maka BPK juga dituntut berperan dalam peningkatan kemampuan pemeriksa BPK secara keseluruhan. Melalui kegiatan ini, diharapkan BPK dapat memperoleh masukan-masukan berharga dari kalangan pendidik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar lebih optimal. Selain itu diharapkan kalangan pendidik memperoleh pemahaman mengenai tugas, fungsi dan peranan BPK dalam keuangan negara sehingga dapat bersama-sama mengawal pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Subbagian Hukum dan Humas

Info lebih lanjut:
Kepala Subbagian Hukum dan Humas BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Supriyonohadi, S.H., M.Si.
Telp.024-8660825 Faks. 024-8660884 Website: www.semarang.bpk.go.id